

## STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK CALON LEGISLATIF DALAM MEMPENGARUHI PEMILIH PEREMPUAN KOTA BANDAR LAMPUNG

<sup>1</sup>AS Mulyadi, <sup>2</sup>MA Syaripudin

Mahasiswa Pascasarjana UIN SGD Bandung, UIN Raden Intan Lampung

Corresponding Author : [apunsyaripudin@radenintan.ac.id](mailto:apunsyaripudin@radenintan.ac.id)

### Abstract

This research focuses on how the political communication of legislators in Bandar Lampung City, which is directed to reach and influence the votes of women voters. This research uses a phenomenological approach. The theory used in this research is Sandra Harding and Julian T. Wood's standpoint theory. The results of the study found that proper political communication will encourage victory because it will be able to win the votes of women voters in Bandar Lampung City in social groups. Even in the political dynamics, women are able to place themselves as; vote getters, become equal partners for men and become drivers of the upholding of women's human rights in the regional political stage. Factors that influence women voters are internal and external factors; level of education, economic independence, cultural values and the political system.

**Keywords** : Political Communication Strategy; Women Voters

### Abstrak

Penelitian ini terfokus pada bagaimana komunikasi politik legislator di Kota Bandar Lampung, yang diarahkan untuk meraih dan mempengaruhi suara pemilih perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah standpoint theory milik Sandra Harding dan Julian T. Wood. Hasil penelitian didapat bahwa komunikasi politik yang tepat akan mendorong kemenangan karena akan mampu meraih suara pemilih perempuan di Kota Bandar Lampung dalam kelompok-kelompok sosial. Bahkan dalam dinamika politik kaum perempuan mampu menempatkan diri sebagai; *vote getter*, menjadi mitra setara bagi laki-laki dan menjadi pendorong tegaknya hak asasi perempuan dalam panggung politik daerah. Faktor yang memengaruhi Pemilih perempuan yaitu faktor Internal dan eksternal; tingkat pendidikan, kemandirian ekonomi, nilai budaya dan sistem politik.

**Kata Kunci**: Strategi Komunikasi Politik; Pemilih Perempuan

### ARTIKEL INFO

#### Article history :

Submit : 25 Februari 2024

Revisi : 11 Maret 2024

Publish : 30 Maret 2024

#### Hikmah :

Jurnal Dakwah Dan Sosial

Volume 4, No. 1, Maret 2024,

Halaman : 43 – 54.



Creative Commons Attribution-  
NonCommercial-ShareAlike 4.0  
International License.

## A. Pendahuluan

Perempuan masuk dalam elemen pembangunan, perempuan selalu menjadi subordinat dan dipersepsikan dalam posisi kedua dibawah laki-laki. Teori feminis menyatakan bahwa ketimpangan hubungan antara perempuan dan laki-laki hanya dapat mendorong perempuan terbelakang. Istilah pemberdayaan perempuan memiliki makna ketidak berdayaan perempuan, diskriminasi, dan ketidakadilan. Perempuan masih dianggap lemah meskipun telah menjadi wanita karir, memiliki penghasilan sendiri dan memiliki beban yang sama dengan laki-laki di tataran domestik, namun justru menjadi bahan eksploitasi. Perempuan dianggap memiliki citra yang berbeda dengan kaum laki-laki. Perempuan cenderung dianggap tidak cocok masuk dalam dunia politik yang dianggap kotor, dan banyak intrik.

Saat ini perempuan mulai dijunjung harkat martabatnya dan masuk dalam kesetaraan gender, perempuan tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga yang menjalankan fungsi reproduksi, mengurus keluarga dan pekerjaan domestik. Perempuan mulai masuk panggung politik dan ikut aktif dalam kegiatan sosial, ekonomi, pemerintahan, meskipun keterwakilannya belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Fenomena bahwa 57% perolehan suara ditentukan oleh suara perempuan, karena setengah jumlah penduduk di Indonesia adalah perempuan, mengabaikan perempuan dalam pembuatan keputusan politik

berarti meminggirkan mayoritas penduduk Indonesia dalam proses politik. (Aeni, Zamroni, and Zuchdi 2016)

Komunikasi politik bertujuan untuk mendorong partisipasi perempuan dalam panggung politik dan pemerintahan, sehingga keterwakilan perempuan tidak hanya untuk memenuhi kuota, namun menjadi bagian dalam memperjuangkan hak dan aspirasi perempuan serta peran perempuan benar-benar berjalan. Penelitian Rahmawati (Arka 2021), bahwa faktor yang cukup signifikan untuk menentukan keterwakilan perempuan yaitu melalui sistem pemilu, peran organisasi partai politik, penerimaan secara kultural dan dukungan melalui *Affirmative Action* yang bersifat sukarela. Penelitian Priandi dan Roisah (Lestarini 2022) menunjukkan naik turunnya keterwakilan perempuan di parlemen dapat dipicu karena kebijakan yang sama. Pada dasarnya gairah kaum perempuan dalam dunia politik jika tidak ditompang dengan kebijakan yang lebih memacu jumlah keterwakilan akan berakibat menurun. Padahal perempuan dalam kacamata feminis bahwa kodrat perempuan tidak ditentukan secara biologis namun oleh budaya di dalam masyarakat. (Bryson 2007) Hal ini dapat dilihat dari penggunaan kebijakan yang sama dari pemilu 2009 dan 2014. Kekhawatiran keterwakilan perempuan menurun itu bukan berarti hilang pada 2019 meski 40 Persen perempuan masuk kedalam daftar pencalonan legislatif pada Pemilu 2019. Masalah strategis yang dalam irama dan

percaturan politik, mengenai peraihan suara perempuan melalui komunikasi politik beserta segala kendala dan faktor pendukung keterlibatannya. Hal ini sangat penting karena dalam perspektif politik modern, logikanya agenda yang kongkrit untuk memajukan peran dan harkat perempuan sudah selayaknya dijadikan salah satu tawaran utama oleh partai politik dan legislatornya untuk melapangkan jalan kemenangannya. Hal ini senada dengan hasil penelitian yang dilakukan Izdiha (2017), bahwa politik merupakan jalan terbaik untuk memperhatikan kebutuhan perempuan, dan penghapusan diskriminasi.(IZDIHA 2017)

Pada kontestasi politik, kandidat bertarung satu sama lain dengan menggunakan berbagai strategi. Banyaknya partai politik yang mencalonkan diri dalam pemilu legislatif 2024 disebabkan oleh sistem multipartai di Indonesia. Persaingan sengit antara partai-partai politik untuk memperebutkan suara pemilih juga dipengaruhi oleh banyaknya partai politik. Jumlah suara yang diperoleh seorang kandidat menunjukkan tingkat dukungan dan kepercayaan publik terhadap individu tersebut. Para kandidat bertarung satu sama lain dengan menggunakan berbagai metode komunikasi politik untuk memenangkan kontestasi pemilu.

Komunikasi politik yang dilakukan harus disesuaikan dengan sistem politik yang ada di Indonesia. Karena itu politik di Indonesia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh komunikasi yang dilakukan oleh pengelola partai. Almond

dan Powell menempatkan komunikasi politik sebagai suatu fungsi politik bersama dengan fungsi artikulasi, agregasi, sosialisasi dan rekrutmen yang terdapat dalam sistem politik. Komunikasi politik sebagai bidang ilmu yang mempelajari perilaku dan kegiatan komunikasi yang bersifat politik, mempunyai akibat politik atau perilaku yang berpengaruh terhadap politik (Sari 2013). Ada lima ruang lingkup dalam komunikasi politik yakni; komunikator politik, pesan politik, media komunikasi politik, khalayak politik, dan efek politik. (Triwicaksono and Nugroho 2021)

Pembagian peran antara laki-laki dan perempuan tidak didasarkan pada disrupsi dan kompetisi namun lebih kepada melestarikan harmoni dan stabilitas kehidupan masyarakat. (Gerson 2002) Pesan politik yang disampaikan oleh komunikator politik dan tujuan komunikasi politik saling terkait erat.(Mukarom 2008) Keberanian perempuan untuk masuk dalam panggung politik memberikan ruang diskusi yang baik, sehingga perlu upaya untuk mencapai kekuatan perempuan dalam politik. Tanpa kemampuan komunikasi politik yang baik, komunitas perempuan cenderung menjadi “muted group”, yang keberadaannya tidak terlalu berarti bagi proses politik (Farooq et al. 2012) Tentu kondisi ini bukan bagian dari implikasi substansi perjuangan *affirmative action*. Penyebaran informasi politik, penciptaan citra politik, dan pembentukan opini publik, terkadang menjadi

satu-satunya tujuan komunikasi politik. Komunikasi politik berusaha untuk memenangkan hati khalayak guna meningkatkan keterlibatan saat pemilu 2024 yang semakin dekat. Komunikasi yang digunakan berpengaruh besar dalam menentukan kemenangan maupun kekalahan seorang kandidat. Tulisan ini membahas strategi komunikasi calon legislatif dalam mempengaruhi pemilih perempuan di Kota Bandar Lampung, sehingga dapat diketahui peran strategi komunikasi yang digunakan dalam kemenangan seorang calon legislatif.

## 1. Literature Review

### a. Strategi Komunikasi

Strategi komunikasi sebagai sebuah perencanaan penyampaian pesan melalui kombinasi berbagai unsur komunikasi seperti frekuensi, formalitas, isi dan saluran komunikasi yang disampaikan mudah diterima dan dipahami serta dapat mengubah sikap atau perilaku sehingga tujuan komunikasi tersampaikan dengan tepat.(Effendy 2003) Sedangkan menurut Kulvisaechana, strategi komunikasi adalah penggunaan kombinasi faset-faset komunikasi dimana termasuk di dalamnya frekuensi komunikasi, formalitas komunikasi, isi komunikasi, dan saluran komunikasi.(Kulvisaechana 2001) Strategi komunikasi erat kaitannya antara tujuan yang hendak dicapai dengan konsekuensi yang harus diperhitungkan, kemudian merencanakan

bagaimana mencapai konsekuensi-konsekuensi sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

### b. Komunikasi Politik

Menurut Nimmo, Komunikasi Politik merupakan kegiatan komunikasi yang berdasarkan konsekuensi baik aktual maupun potensial yang mengatur perbuatan manusia dalam kondisi konflik.(Nimmo 1989) Menurut Roelops bahwa komunikasi yang materi pesannya berisi politik yang mencakup kekuasaan dan penempatan pada lembaga-lembaga kekuasaan. Sedangkan menurut Cangaraa bahwa komunikasi politik adalah suatu bidang atau disiplin yang menelaah perilaku dan kegiatan komunikasi yang bersifat politik, mempunyai akibat politik, maupun pengaruh terhadap perilaku politik.(Nasution and IP 1990)

### c. Pendekatan Perilaku Pemilih

Pendekatan untuk melihat perilaku pemilih terbagi atas empat pendekatan yakni pendekatan sosiologis disebut sebagai Mazhab Columbia (*The Columbia of Electoral Behavioral*), pendekatan psikologis disebut sebagai Mazhab Michigan (*The Michigan Survey Research Center*) dan pendekatan rasional serta pendekatan domain kognitif (pendekatan marketing).(Wahyudi and Kamaruddin 2023) Pemilih merupakan semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian

memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan.(Yandra 2017)

## B. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus,(Rahardjo 2017) sebagaimana dikatakan suatu penelitian dikategorikan studi kasus tunggal, bilamana penelitian tersebut terarah pada satu karakteristik. Penelitian tersebut hanya dilakukan pada satu sasaran (satu lokasi, atau satu subjek). Jadi yang terpenting bukan jumlah lokasinya, tetapi adanya perbedaan karakteristik atau kesamaannya. Subjek dalam penelitian ini adalah politisi yang konsern dalam menerapkan komunikasi politik guna meraih suara perempuan di Kota Bandar Lampung. Sedangkan objek penelitiannya posisi pemilih perempuan dalam komunikasi politik menjelang Pemilu 2024, sehingga pendekatan yang digunakan yaitu fenomenologi dimana makna dipahami dari berbagai peristiwa dan interaksi yang terjadi pada situasi khusus. Fenomenologi menjadikan pengalaman hidup yang sesungguhnya sebagai data dasar dari realita.(Kuswarno 2006)

Selain itu, data diperoleh dengan melakukan *in deep interview* (wawancara mendalam) pada Komunitas Perempuan, yakni beberapa kelompok Majelis Ta'lim, Observasi dilakukan dengan melihat aktivitas komunikasi politik calon legislatif dalam mempengaruhi suara perempuan. Teknik analisis data model interaktif milik Miles dan Michael (Mauricio et

al. 2006). Keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi yaitu pertama, melakukan perbandingan data wawancara dan observasi. Kedua, melakukan konfirmasi dengan subjek penelitian dan membandingkan satu dengan yang lainnya untuk mendapatkan data yang tepat. Ketiga, membandingkan hasil wawancara dan dokumen yang berkaitan, seperti; buku, transkrip, audio visual serta kegiatan komunikasi politik calon legislatif dalam mempengaruhi komunitas perempuan menjelang pemilihan umum di Kota Bandar Lampung.

## C. Pembahasan

Representasi perempuan merupakan bagian utama jika berbicara tentang kesetaraan gender dalam demokrasi. Dapat dikatakan bahwa demokrasi akan lengkap ketika perempuan terlibat di dalamnya. Persentase suara pemilih perempuan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 Bidang Politik dan Komunikasi Kementerian PPN BAPPENAS, terkait posisi pemilih perempuan, *affirmative action* pencalonan perempuan sekalipun ternyata hanya mampu memberikan akses pencalonannya saja, sementara pada proses kontestasinya masih terdapat ketimpangan dalam strategi berpolitik, akses informasi, relasi yang masih dominan dilandasi oleh faktor kekerabatan. (Nurussa'adah 2020).

Pada percaturan politik daerahpun hal yang sama terjadi, peningkatan jumlah keterwakilan

perempuan menjadikan demokrasi lebih adil meskipun keterwakilan perempuan di parlemen masih di bawah kuota yang diberikan. Partisipasi politik yang berkaitan dengan affirmative action akan fokus pada bentuk keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan baik secara formal pada institusi politik maupun lainnya. Partisipasi politik ini didasari oleh pentingnya peran perempuan di ranah politik khususnya berkaitan dengan upaya membentuk masyarakat demokrasi dengan ditandai oleh keseimbangan partisipasi dan perwakilan politik antara perempuan dan laki-laki (Rahmatunnisa n.d.) Pemikiran tersebut juga didasari oleh perbedaan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki, sehingga keseimbangan keterwakilan perempuan diharapkan dapat menelurkan kebijakan yang menguntungkan kaum perempuan guna terwujudnya prinsip kesetaraan politik (political equality) dalam sistem politik demokrasi. Dasar lain yang melatarbelakangi, agar perempuan memiliki kekuatan dalam mempengaruhi (influential voice) yang kemudian membantu mereka dalam membentuk sebuah koalisi yang dapat meningkatkan pengaruh dalam proses pengambilan keputusan.

Pada pemilihan umum Kota Bandar Lampung tahun 2019, keterwakilan perempuan sudah sangat baik, melebihi kuota 30%. Persentase keterlibatan perempuan dalam

kegiatan partai maupun pemerintah di Kota Bandar Lampung tentu dapat dikatakan baik, dan meningkat pada pemilu 2019, sehingga dapat dikatakan bahwa kuota 30% yang ditetapkan pemerintah, telah mendorong adanya politik yang lebih demokratis. Dinamika politik di Kota Bandar Lampung juga sangat unik, dimana para pemilih perempuan sangat mendominasi, sehingga komunitas perempuan sangat diperhitungkan.

Komunikasi politik dalam mempengaruhi pemilih perempuan merupakan bagian yang tidak terpisahkan, karena partai politik menggunakan saluran informasi yang efektif dalam menyampaikan pesan politiknya. Salah satu saluran yang digunakan yaitu melalui perwakilan partai di panggung politik. Dalam konteks ini tentu berkaitan dengan perempuan dan perannya sebagai komunikator politik. Komunikator politik mewakili kepentingan kelompok, dan juga menetapkan tujuan kebijakan yang lebih luas, mengusahakan reformasi, dan mendukung revolusioner (Gleeson et al. 2011) Komunikator dalam komunikasi politik dapat berwujud individu, lembaga, maupun kumpulan orang. Pada kesempatan yang lain, memang secara jelas dapat dibedakan bahwa seseorang individu yang berbicara, tetapi menjurus pada suatu lembaga atau organisasi, maka pada saat itu dapat dipandang sebagai *collective source* atau sumber kolektif. (Aeni et al. 2016)

Legislator yang aktif dalam panggung politik atau lembaga legislatif, maupun organisasi masyarakat harus memiliki kemampuan sebagai komunikator politik, baik sebagai sumber individu maupun kolektif. Pada peran ini, legislator harus lebih mengusahakan komunikasi politik dalam bentuk partisipasi langsung. Hal ini terlihat bahwa legislator dapat menjadi media penghubung ke masyarakat dan juga menjembatani kepentingan secara khusus, dan secara umum. Peran komunikator politik juga dapat dilihat dari beberapa fraksi di Bandar Lampung yang melibatkan diri pada bidang pemerintahan, bidang perekonomian, bidang kesejahteraan masyarakat, hingga pada badan pembentukan peraturan daerah. Ada beberapa faktor yang memengaruhi peran legislator dalam pemilihan umum di Kota Bandar Lampung, yaitu:

*Pertama*, Tingkat pendidikan sangat mendorong terciptanya partisipasi politik di tengah warga masyarakat. Semakin baik taraf pendidikan, maka akan berimbang dengan naiknya aksesabilitas terhadap sumber-sumber informasi, dan dijadikan bahan pertimbangan masyarakat untuk turut berkiprah.

*Kedua*, Perempuan yang memiliki kemandirian ekonomi cenderung menganggap bahwa berpolitik bagian dari hak. Begitu juga pada perempuan dalam komunikasi politik, kemandirian ekonomi pada calon anggota legislatif dimaknai sebagai kemampuan mereka secara mandiri untuk dapat memimpin dan

memperjuangkan aspirasi masyarakat. Hal ini didukung oleh pernyataan Weyner, partisipasi politik akan semakin luas, ditandai dengan munculnya kelas pekerja dan memberi penekanan pada peluang siapakah yang dapat berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik dan memberi perubahan pola partisipasi politik. Pada kajian feminis dijelaskan bahwa tujuan dari feminisme adalah untuk mendorong perubahan ke arah kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, (Macionis 2012) sehingga kemandirian secara ekonomipun merupakan hak perempuan.

*Ketiga*, Nilai budaya yang dianut dan menjadi dasar tindakan setiap individu. Masyarakat konvensional lebih menganggap perempuan lebih cocok ketika berada pada sektor domestik (keluarga atau rumah) yang kemudian terbawa pada sektor publik, yang mengutamakan laki-laki dibanding perempuan sehingga memunculkan budaya patriarki. Hal ini yang kemudian memberikan pandangan dan tantangan bagi perempuan dalam ranah politik yang didominasi oleh laki-laki, sehingga perempuan lebih pada aspek pemilih pada kantong-kantong suara di daerah pemilihan.

*Keempat*, perspektif agama berpengaruh terhadap kepemimpinan perempuan, bahwa pemimpin itu laki-laki sehingga perempuan hanya diperlukan untuk mendongkrak perolehan suara pemilih. Dari sisi keluarga lebih cenderung pada budaya patriarki, kepala keluarga cenderung menjadi penentu suara

keluarganya, sehingga posisi ini membuat perempuan tidak berdaya untuk memilih calon perempuan. Faktor di atas menunjukkan bahwa masih adanya ketimpangan peran dan relasi gender yang perlu ditinjau kembali. Perempuan dalam kacamata feminis bahwa kodrat perempuan tidak ditentukan secara biologis namun oleh budaya di dalam masyarakat.

Merujuk pada sistem politik yang diatur melalui UU No. 12 Tahun 2003 mengenai legitimasi keterwakilan perempuan sebagai caleg partai politik dengan kuota 30%. Diperkuat lagi dengan pasal 53 mengenai bakal calon peserta pemilu harus memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Hal tersebut bertolak belakang dengan aturan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*), dimana setiap partai politik harus memperoleh suara minimal partai politik dalam pemilihan umum untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal inilah yang kemudian berpengaruh terhadap semangat perempuan yang ingin ikut berkiprah dalam panggung politik daerah khususnya di Kota Bandar Lampung. Partisipasi perempuan dapat memberikan peluang besar bagi demokrasi Indonesia dan penegakan hak asasi manusia. Upaya ini juga untuk menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Partisipasi politik perempuan (*partisipasi affirmative action*) dalam pemilihan umum merupakan

realisasi dari bentuk politik gender, sehingga tidak hanya dianggap sebagai alat untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan di ranah publik.

Tingginya persentase partisipasi suara pemilih perempuan dalam pemilu di Kota Bandar Lampung Tahun 2019 juga telah menunjukkan adanya kesetaraan gender yang memberi cara pandang baru terhadap kesetaraan hak laki-laki dan perempuan. Sehingga dalam analisis ini, calon perempuan sudah mulai dipercaya memimpin oleh masyarakat. Kecenderungan menempatkan perempuan dalam sektor domestik (keluarga atau rumah) juga sudah mulai berkurang. Perempuan sudah mulai menunjukkan sisi kemandirian ekonomi dengan memiliki profesi. Perempuan dapat menentukan arah politik tanpa harus terdoktrin dengan keputusan kepala keluarga. Cara ampuh bagi partai politik untuk memperoleh dukungan suara perempuan yaitu dengan menempatkan perempuan dalam organisasi partai politik. Perempuan tidak hanya menjadi *vote getter* dalam pemilihan umum, namun dilihat dari kapasitas dan kapabilitas diri. Keterlibatan perempuan di Kota Bandar Lampung masih ada yang menggunakan sebagai *vote getter*, namun dalam kepemimpinan, perempuan berani menunjukkan bahwa kapasitas dan kapabilitas dalam ranah politik tidak diragukan. Peran perempuan yang secara spesifik sebagai selebritis dan masuk menjadi kader partai

politik tentu memiliki peran strategis meskipun beberapa partai masih menggunakannya sebagai pendulang suara semata. Masyarakat Bandar Lampung juga mulai cerdas dalam menentukan pilihan, tidak hanya melihat dari tampilan fisik, namun melihat kemampuan calon legislatif dalam meyakinkan pemilihnya. Komunikator politik dalam pemilihan umum di Kota Bandar Lampung, tidak berbeda antara perempuan dengan laki-laki. Pembagian peran antara laki-laki dan perempuan tidak didasarkan pada disrupsi dan kompetisi namun lebih kepada melestarikan harmoni dan stabilitas di dalam masyarakat.

Pada pemilihan umum di Kota Bandar Lampung, posisi perempuan ketika menjadi komunikator politik ditunjukkan dengan peranya untuk menyuarakan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada perempuan, selain itu yang dapat dijumpai bahwa perempuan yang masuk dalam pemilihan umum Kota Bandar Lampung adalah perempuan yang sebagian besar memang aktif dalam organisasi perempuan, organisasi sosial masyarakat, dan bahkan pernah menjabat sebagai pejabat publik. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Mukarom, bahwa upaya counter komunikasi politik yang pertama perlu dilakukan oleh perempuan adalah dengan pengarusutamaan gender (gender mainstream). Pada pemilihan umum Kota Bandar Lampung, empowering role yang dapat dilihat yaitu, sebagian besar anggota legislatif berpendidikan

tinggi. Hal ini berkaitan dengan semakin dipertimbangkannya tingkat pendidikan untuk mendukung kepemimpinan.

Merujuk pada salah satu prinsip dasar dalam feminisme yaitu penghapusan stratifikasi gender dengan adanya penolakan norma budaya yang membatasi kesempatan perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pendidikan dan pekerjaan dan upah yang layak.(Ma'mun 2018) Kemandirian ekonomi yang dapat memunculkan kepercayaan diri perempuan yang dapat dicirikan dengan bekerja dan memiliki penghasilan pribadi. Hal ini terlihat pada anggota legislatif Kota Bandar Lampung yang secara finansial memiliki kemandirian ekonomi yang dicirikan dengan kemampuan untuk maju dalam panggung politik, memiliki pekerjaan dan penghasilan pribadi. Peran perempuan dalam aktifitas politik dan organisasi masyarakat menjadikan terkikisnya budaya patriarki dan penafsiran sempit terhadap ajaran agama. Perempuan yang terlibat dalam pemilihan umum Kota Bandar Lampung, sebagaimana diungkapkan oleh anggota komisi di DPRD Kota Bandar Lampung memiliki keterkaitan erat dengan organisasi masyarakat dan peran perempuan di dalamnya. Perempuan sebagai elemen civil society memiliki tempat yang khusus dalam meletakkan dirinya untuk mendorong demokratisasi dan melakukan upaya penyadaran kepada rakyat bahwa mereka punya hak untuk didengar oleh negara.(Tito 2023) Hal tersebut

tentu berkaitan dengan kepentingan perempuan yang tertuang dalam sebuah kebijakan.

#### D. Kesimpulan

Posisi suara perempuan dalam pemilihan umum Daerah dapat dilihat dari: 1) Partisipasi politik (*Affirmative Action*) telah mendorong adanya politik yang lebih demokratis di Kota Bandar Lampung, adanya kesetaraan gender, perempuan tidak hanya menjadi *vote getter* dalam pemilihan umum, namun mampu menjadi mitra setara bagi laki-laki dalam pengambilan kebijakan yang responsif gender; Tegaknya hak azazi dalam panggung politik daerah; terciptanya kesadaran tentang pentingnya mengakomodasi suara perempuan, terutama untuk perempuan menduduki jabatan setrategis; Adanya upaya untuk menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; 2) Perempuan sebagai komunikator politik dalam Pemilihan Umum di Kota Bandar Lampung dapat dilihat dari beberapa fraksi di DPRD yang melibatkan perempuan pada bidang pemerintahan, bidang perekonomian, bidang kesejahteraan masyarakat, dan badan pembentukan peraturan daerah; 3) Tingkat pendidikan sangat mendorong terciptanya partisipasi politik di tengah masyarakat.

Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah bahwa suara pemilih perempuan dapat menjadi faktor penentu bagi kemenangan dalam kontestasi politik, maka sudah saatnya meningkatkan kapasitas perempuan agar mampu berperan aktif dalam

aktivitas politik dan pemerintahan melalui kegiatan sosialisasi, seminar maupun gerakan masyarakat serta kegiatan pendampingan; Mendorong perempuan untuk masuk dalam organisasi; Meningkatkan kemandirian perempuan, sehingga perempuan memiliki posisi tawar saat berkomunikasi dan mampu memperjuangkan kepentingannya; Menguatkan dan melanjutkan kebijakan alternatif mengenai pentingnya peran perempuan di panggung politik.

#### E. Daftar Pustaka

- Aeni, Kurotul, Zamroni Zamroni, and Darmiyati Zuchdi. 2016. "Pendayagunaan Modal Sosial Dalam Pendidikan Karakter." *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi* 4(1): 30–42.
- Arka, I. Ketut. 2021. "Pengaruh Affirmative Action Terhadap Elektabilitas Calon Perempuan Dalam Pemilu 2019 Di Kota Denpasar." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2(3): 749–62.
- Bryson, Valerie. 2007. *Gender and the Politics of Time: Feminist Theory and Contemporary Debates*. Policy Press.
- Effendy, Onong Uchjana. 2003. *Ilmu, Teori Dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti 200.
- Farooq, Muhammad, M. Hussain, Abdul Wahid, and K. H. M. Siddique. 2012. "Drought Stress in Plants: An Overview." *Plant Responses to Drought Stress: From Morphological to Molecular Features* 1–33.
- Gerson, Kathleen. 2002. "Moral Dilemmas, Moral Strategies, and the Transformation of Gender: Lessons from Two

- Generations of Work and Family Change.” *Gender & Society* 16(1): 8–28.
- Gleeson, Michael, Nicolette C. Bishop, David J. Stensel, Martin R. Lindley, Sarabjit S. Mastana, and Myra A. Nimmo. 2011. “The Anti-Inflammatory Effects of Exercise: Mechanisms and Implications for the Prevention and Treatment of Disease.” *Nature Reviews Immunology* 11(9): 607–15.
- Izdiha, Anis. 2017. “Praktik Kekerasan Simbolik Pada Ibu Hamil Di Desa Jatibaru, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat.”
- Kulvisaechana, Somboon. 2001. *The Role of Communication Strategies in Change Management Process: A Case Study of Consignia Brand and Business Status Introduction*. Vol. 3. Judge of Management Studies, University of Cambridge.
- Kuswarno, Engkus. 2006. “Tradisi Fenomenologi Pada Penelitian Komunikasi Kualitatif: Sebuah Pengalaman Akademis.” *MediaTor (Jurnal Komunikasi)* 7(1): 47–58.
- Lestarini, Ratih. 2022. “Hak Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Pada Masyarakat Adat Baduy.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52(1): 320–47.
- Ma'mun, Syukron. 2018. “Analisa Pengaruh Faktor Pendidikan Terhadap Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilihan Kepala Desa (Pilwu) Tahun 2017 Di Kecamatan Widasari.” *Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan* 2(02): 302–22.
- Macionis, John. 2012. “Sosiologi (Çev. V. Akan).” *Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık*.
- Mauricio, Isabel L., Matthew Yeo, Mehdi Baghaei, Daniela Doto, Francine Pratlong, Eva Zemanova, Jean-Pierre Dedet, Julius Lukes, and Michael A. Miles. 2006. “Towards Multilocus Sequence Typing of the Leishmania Donovanii Complex: Resolving Genotypes and Haplotypes for Five Polymorphic Metabolic Enzymes (ASAT, GPI, NH1, NH2, PGD).” *International Journal for Parasitology* 36(7):757–69.
- Mukarom, Zaenal. 2008. “Perempuan Dan Politik: Studi Komunikasi Politik Tentang Keterwakilan Perempuan Di Legislatif.” *MediaTor (Jurnal Komunikasi)* 9(2): 257–70.
- Nasution, Zulkarimein, and S. IP. 1990. “Komunikasi Politik.” Suatu Pengantar, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nimmo, Dan. 1989. “Komunikasi Politik Khalayak Dan Efek.”
- Nurussa'adah, Erfina. 2020. “Perempuan Dan Komunikasi Politik Pada Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Jurnal Ilmu Komunikasi* 18(1): 111–23.
- Rahardjo, Mudjia. 2017. “Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya.”
- Rahmatunnisa, Mudiayati. n.d. “Challenges Faced By Women Legislators In Indonesia: A Case Study From Cirebon, West Java.”
- Sari, Ervi Yumika. 2013. “Strategi Komunikasi Politik Pdi-Perjuangan Pada Pemilihan Legislatif Tanjungpinang Tahun 2009.” Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.
- Tito, Fitara Anindita. 2023. “Commodification of Celebrities in the 2024 General Election Contestation.” *MEDIASI Jurnal Kajian Dan Terapan Media, Bahasa, Komunikasi* 4(2): 119–29.
- Triwicaksono, Yohanes De Britto Bimo, and Adi Nugroho. 2021. “Strategi

Komunikasi Politik Pemenangan Kepala Daerah.” *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi* 5(1): 133–45.

Wahyudi, Rodi, and Kamaruddin Kamaruddin. 2023. “Factors Affecting Changes in Citizens’ Choices in Mayoral Election Dumai in 2020.” Pp. 57–60 in International Conference Social-Humanities in Maritime and Border Area (SHIMBA 2023). Atlantis Press.

Yandra, Alexsander. 2017. “Fisibilitas Pilkada Serentak Tahap II Kota Pekanbaru Pasca Permendagri No 18 Tahun 2015.” *Jurnal Niara* 9(2): 62–74.